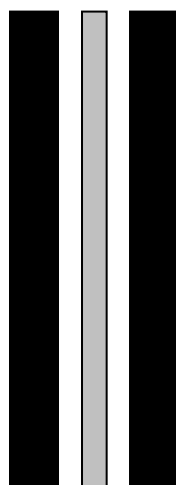




**RANCANGAN
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025**



KOTAPINANG, JANUARI 2024

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Awal Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2005-2025.

Lebih lanjut isi Rancangan Rencana Kerja ini adalah gambaran perencanaan berbagai kebutuhan sebagai pendukung Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan nantinya, yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, dengan memperhatikan regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. SOFYAN HASIBUAN, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690408 199803 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Kerja merupakan suatu proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh pimpinan, dimana hasilnya dapat diukur. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah maka Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif menyusun Rencana Kerja OPD pada setiap tahunnya sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD. Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD (2005-2025). Fungsi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam urusan pembinaan dan pengawasan diharapkan mampu memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa sehingga mereka dapat mendukung program pembangunan daerah secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan

perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan misi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja (dasar hukum) yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan

18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di Tahun 2024, lingkungan dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

- Sebagai acuan bagi seluruh jajaran pegawai Inspektorat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

2. Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD (2005-2025).

Secara spesifik tujuan disusun Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

- Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun; dan
- Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

2.1. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi dan proses penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renja Inspektorat Daerah dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renja

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan tahun berjalan Renja Inspektorat Daerah (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional,

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

2.4. Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan disampaikan pada RKPD Inspektorat Daerah Tahun 2025 berdasarkan analisis kebutuhan dan sinkronisasi dengan RPJMD 2021-2026.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan RKPD.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2023)

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2023) Dan Capaian Renja

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 . Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pencapaian Rencana Kerja Inspektorat Daerah menjadi indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renja tersebut juga merupakan referensi untuk menyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD pada tahun selanjutnya. Evaluasi hasil Renja OPD dan pencapaian RENJA OPD sampai dengan tahun berjalan disajikan sebagaimana tabel 1 adalah evaluasi RENJA Inspektorat Daerah pada tahun terakhir.

Tabel 1
Evaluasi Hasil Renja OPD Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit OPD Penganggung Jawab
			4	5	6	7	8				
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
			I.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
II.	INSPEKTORAT DAERAH										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Sistem Kerja yang Akuntabel selama 1 tahun									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dok	-	- Dok	-	0 Dok	-	0%	0%	Inspektorat
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dok	-	- Dok	-	0 Dok	-	0%	0%	Inspektorat

03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dok	-	- Dok	-	0 Dok	-	0%	0%	Inspektorat
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Dok	-	- Dok	-	0 Dok	-	0%	0%	Inspektorat
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Dok	-	- Dok	-	0 Dok	-	0%	0%	Inspektorat
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Lap	-	- Lap	-	0 Lap	-	0%	0%	Inspektorat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bln	4.694.485.501	104 Org/Bln	3.960.041.008	104 Org/Bln	7.392.715.226	69%	30%	Inspektorat
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	50.312.421	12 Dok	49.760.524	12 Dok	72.635.774	18%	21%	Inspektorat
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	36.960.000	12 Dok	36.960.000	12 Dok	62.040.000	18%	17%	Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Pkt	57.468.522	1 Pkt	52.724.000	1 Pkt	52.724.000	17%	25%	Inspektorat
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Org	163.190.000	20 Org	150.791.734	20 Org	223.698.734	20%	11%	Inspektorat
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Org	27.587.011	50 Org	22.863.000	50 Org	96.062.500	10%	26%	Inspektorat

	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Org	349.918.000	70 Org	330.000.000	70 Org	330.000.000	175%	83%	Inspektorat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Pkt	7.680.642	1 Pkt	7.665.485	1 Pkt	12.701.185	17%	26%	Inspektorat
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Pkt	4.663.416	1 Pkt	4.616.150	1 Pkt	9.274.700	17%	33%	Inspektorat
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Pkt	8.484.690	1 Pkt	7.508.700	1 Pkt	14.207.640	17%	10%	Inspektorat
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Lap	255.892.721	56 Lap	236.233.700	56 Lap	464.325.213	17%	26%	Inspektorat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Penambahan Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah									
	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	17 Unit	39.683.601	17 Unit	32.100.000	17 Unit	80.385.000	12%	36%	Inspektorat
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	42.741.336	3 Unit	42.000.000	3 Unit	59.471.400	3%	10%	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46 Lap	2.271.739	12 Lap	780.000	12 Lap	1.536.000	4%	11%	Inspektorat
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	74.400.000	12 Lap	52.907.503	12 Lap	106.468.728	17%	24%	Inspektorat
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	222.162.804	12 Lap	222.144.000	12 Lap	435.144.000	17%	24%	Inspektorat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah									

01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	39.922.750	9 Unit	39.738.125	9 Unit	78.833.246	17%	13%	Inspektorat
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	136.958.665	3 Unit	131.304.216	3 Unit	218.493.948	17%	35%	Inspektorat
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58 Unit	24.960.000	58 Unit	21.410.000	58 Unit	29.735.000	17%	20%	Inspektorat
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	119.700.000	1 Unit	118.757.000	1 Unit	179.498.975	17%	92%	Inspektorat
Jumlah Target dan Realisasi per-Program				6.359.443.819		5.520.305.145					
Rata-Rata capaian Kinerja (%) per-Program						86,80%			19,73%	21,94%	
Predikat Kinerja per-Program						Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terselenggaranya Peningkatan Sistem Pengawasan									
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya Pengawasan Internal									
01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Lap	1.800.000	1 Lap	300.000	1 Lap	10.950.000	2%	7%	Inspektorat
02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90 Lap	145.854.884	90 Lap	145.280.600	90 Lap	241.044.350	17%	29%	Inspektorat
03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	10 Lap	43.350.000	10 Lap	43.350.000	10 Lap	58.286.000	17%	14%	Inspektorat
04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	25 Lap	12.750.000	25 Lap	12.600.000	25 Lap	19.050.000	17%	21%	Inspektorat

	05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	120 Lap	152.832.702	120 Lap	117.167.750	120 Lap	219.362.750	17%	25%	Inspektorat
	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	5 Kes	11.550.000	5 Kes	7.350.000	5 Kes	7.350.000	19%	12%	Inspektorat
	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dok	137.801.907	4 Dok	125.476.630	4 Dok	199.787.980	17%	11%	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu									
	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	20 Lap	128.002.609	20 Lap	78.166.791	20 Lap	129.497.789	17%	10%	Inspektorat
	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Lap	132.397.298	20 Lap	80.757.600	20 Lap	117.857.000	18%	22%	Inspektorat
Jumlah Target dan Realisasi per-Program					766.339.400		610.449.371					
Rata-Rata capaian Kinerja (%) per-Program							79,66%			15,45%	16,62%	
Predikat Kinerja per-Program							Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Terselenggaranya Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi									
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rek	29.952.400	10 Rek	22.844.500	10 Rek	22.844.500	33%	7%	Inspektorat
	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5 Rek	34.327.200	5 Rek	26.606.000	5 Rek	26.606.000	19%	9%	Inspektorat
	Pendampingan dan Asistensi		Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi									
	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9 PD	392.299.029	9 PD	373.140.800	9 PD	376.440.800	21%	607%	Inspektorat

	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35	PD	-	-	PD	-	0	PD	-	0%	0%	Inspektorat
	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	Keg	151.828.282	2	Keg	130.303.700	2	Keg	218.729.795	33%	16%	Inspektorat
	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25	PD	18.302.000	25	PD	2.798.000	25	PD	2.798.000	12%	1%	Inspektorat
Jumlah Target dan Realisasi per-Program						626.708.911			555.693.000						
Rata-Rata capaian Kinerja (%) per-Program									88,67%			19,85%	106,55%		
Predikat Kinerja per-Program									Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Terwujudnya Penambahan Ruang Kerja Inspektorat												
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Terwujudnya Penambahan Ruang Kerja Inspektorat												
	02	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Desain Perencanaan Penambahan Ruang Kerja Inspektorat	-	Pkt	-	-	Pkt	-	0	Pkt	-	0%	0%	Inspektorat
Jumlah Target dan Realisasi per-Program															

	-		-					
Rata-Rata capaian Kinerja (%) per-Program			0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja per-Program			Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Total		7.752.492.130		6.686.447.516		11.570.556.233		
				86,25%			55,03%	145,11%
				Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Keberadaan Inspektorat sebagai perpanjangan tangan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawas bagi perangkat daerah yang lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Inspektorat Daerah harus mampu menjadi panutan bagi perangkat daerah yang lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten diharapkan terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran pengawasan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta terciptanya aparatur yang bersih;
2. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah;
3. Tumbuh kembangnya sinergifitas pengawasan di lingkungan Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah;
4. Terlaksananya prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik.

Sebagai upaya menciptakan kondisi yang diinginkan maka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Daerah sebagai unit pembinaan dan pengawasan harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan, maka identifikasi dan evaluasi pelayanan dapat dilihat dari kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RENJA Inspektorat Daerah.

3.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016.

TUGAS

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut, “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

FUNGSI

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari :

- A. Inspektur;
- B. Sekretaris, yang mana membawahi sebagai berikut :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- C. Inspektur Pembantu Wilayah I
- D. Inspektur Pembantu Wilayah II
- E. Inspektur Pembantu Wilayah III
- F. Inspektur Pembantu Khusus
- G. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

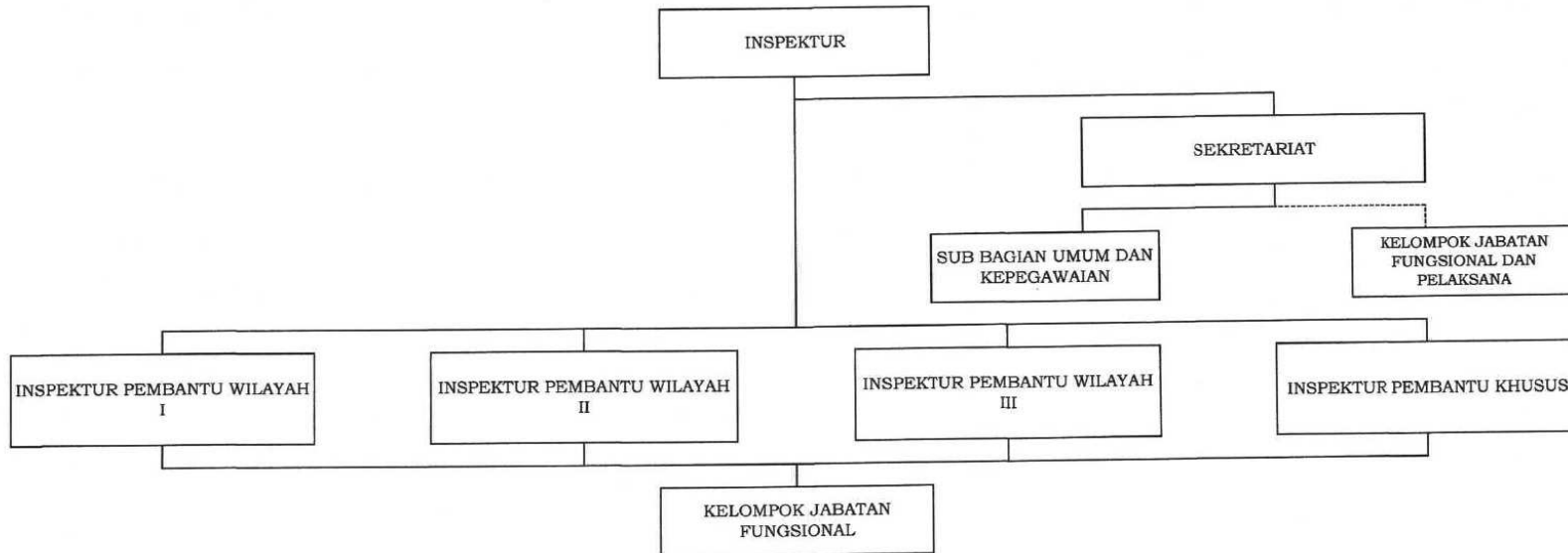
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah ini :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TANGGAL 7 April 2022



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ttd,

H. EDIMIN

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya. Adapun kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain :

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih.
2. Terjadinya koreksi internal terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Terpenuhinya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan (pengawasan masyarakat).
4. Terpenuhinya kualifikasi aparatur pengawasan secara merata sesuai dengan tuntutan profesi auditor.
5. Terpenuhinya pelayanan yang optimal terhadap objek pengawasan.

Namun peningkatan tersebut belum optimal, masih banyak potensi yang perlu digali. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam peningkatan optimalisasi pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah khususnya tenaga auditor mengingat saat ini semakin bertambah jenis dan substansi kinerja pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
2. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum dilaksanakan sepenuhnya kode etik pengawasan dan standar operasional prosedur untuk melaksanakan kegiatan pengawasan;
4. Belum ada persepsi/ mindset yang sama antar Stakeholders sehingga masih ada ego sektoral mengutamakan kepentingan masing-masing sehingga tidak sinergis mendukung tujuan dan sasaran;
5. Lebaranya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

3.4. Rancangan RKPD

Rancangan Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rancangan rencana kerja OPD disusun sebagai langkah awal dalam proses perencanaan. Rancangan rencana kerja OPD tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan tingkat realisasi anggaran pada tahun 2023 dan memperhatikan rencana kerja tahun 2024 serta memperhatikan kebijakan pengawasan dan program pengawasan nasional. Rancangan rencana kerja OPD Tahun 2025 tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diharapkan rancangan rencana kerja Tahun 2025 yang disusun ini tidak mengalami perubahan yang signifikan pada saat penetapan rencana kerja OPD final.

Tabel 2
Rancangan RKPD Inspektorat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6	01				INSPEKTORAT DAERAH					
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.000.000	APBD
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	APBD
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	APBD
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dokumen	-	APBD
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	APBD
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	APBD
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun		

6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotapinang	Tersusunnya Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	5.167.535.824	APBD
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	50.312.421	APBD
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	67.200.000	APBD
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	APBD
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	APBD
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kotapinang	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	58.305.394	APBD
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kotapinang	Tersedianya Pegawai Auditor Ahli dan Meningkatkan Kualitas APIP	20 Orang	697.026.000	APBD
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	79.587.733	APBD
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Bimbingan Teknis ASN	2 Orang	80.356.000	APBD
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotapinang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 Paket	7.448.962	APBD
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotapinang	Melengkapi Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	1 Paket	6.750.637	APBD
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kotapinang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	15.100.000	APBD
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	29.564.384	APBD
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotapinang	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Luar dan Dalam Provinsi	56 Laporan	248.375.921	APBD
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kotapinang	Tersedianya Penambahan Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Tahun		

6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotapinang	Penambahan Mobil Lapangan Untuk Peningkatan Kinerja ASN	3 Unit	339.332.880	APBD
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kotapinang	Penambahan Mebel Kantor Untuk Peningkatan Kinerja ASN	21 Unit	71.545.675	APBD
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotapinang	Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya Untuk Peningkatan Kinerja ASN	18 Unit	144.875.683	APBD
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan dan Pembangunan Ruang Kerja Inspektorat	1 Unit	1.852.221.000	APBD
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotapinang	Tersusunnya Ekspedisi Surat Menyurat	44 Laporan	3.408.424	APBD
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotapinang	Tersedianya Komunikasi dan Listrik Kantor	12 Laporan	94.590.348	APBD
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kotapinang	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	222.162.804	APBD
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kotapinang	Perpanjangan Pajak, BBM dan Perawatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	39.922.750	APBD
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotapinang	Perpanjangan Pajak, BBM dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	136.958.665	APBD
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotapinang	Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	58 Unit	37.460.000	APBD
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotapinang	Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	51.300.000	APBD
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Internal	1 Tahun		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotapinang	Terawasinya Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	30.075.385	APBD
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kotapinang	Terawasinya Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	144.361.567	APBD

6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kotapinang	Tereviunya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	79.500.000	APBD
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kotapinang	Tereviunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	15.750.000	APBD
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Desa	120 Laporan	178.632.702	APBD
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kotapinang	Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Internal	12 Kesepakatan	11.550.000	APBD
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kotapinang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	150.112.907	APBD
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Tahun		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kotapinang	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	20 Laporan	144.012.609	APBD
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kotapinang	Terlaksananya Penanganan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	140.157.298	APBD
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Tahun		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rekomendasi	41.323.400	APBD
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10 Rekomendasi	43.927.200	APBD
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	1 Tahun		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	15.750.000	APBD
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	48.934.680	APBD

6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotapinang	Terwujudnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	205.418.022	APBD
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	48.954.000	APBD
Jumlah									10.808.801.275	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Seluruh dokumen perencanaan tersebut sampai dengan tahun anggaran 2021 telah selesai diantaranya RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Seluruh dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan nasional. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga harus berpedoman pada dokumen RPJMN.

Berdasarkan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN sehubungan dengan kinerja Inspektorat Daerah, maka pemerintah mempunyai target antara lain kapabilitas APIP level 3 dan maturitas SPIP level 3 pada tahun 2023. Program pemerintah ini harus diwujudkan oleh seluruh pemerintahan daerah dan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mencantumkan program ini pada RPJMD dan akan tetap menjadi prioritas pada tahun 2025 ini.

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Dalam rangka mewujudkan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka perlu dijabarkan kembali yang menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah selaku unsur pembinaan dan pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan yang tumpang tindih antar sesama APIP pada audit dan memberikan sasaran dan jenis pemeriksaan yang tepat;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pengawas (auditor) sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan yang semakin banyak

dan mampu menindaklanjuti aduan dari pihak luar termasuk masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan;

3. Meningkatkan informasi dan koordinasi terkait profil OPD secara terus menerus sehingga pengawasan dapat lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran;
4. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan baik dan benar berpedoman kepada peraturan dan kebutuhan.

Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kerja sama penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan dalam 1 tahun;
2. Terlaksananya pengawasan yang efektif;
3. Terkelolanya pegawai dengan baik mencakup tingkat kedisiplinan, wawasan dan pengetahuan aparatur;
4. Informasi tentang auditan selalu diperoleh sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan;
5. Laporan dari hasil pengawasan bermanfaat, berkualitas dan dapat diandalkan sehingga dapat menjadi dasar bagi Bupati Labuhanbatu Selatan untuk pengambilan keputusan termasuk dalam melakukan pembinaan terhadap pegawai.

4.3. Program dan Kegiatan

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Periode 2005-2026. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan pembangunan nasional yang harus dipedomani.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terpilih periode 2021-2026 belum di bentuk karena baru terpilih dan belum dilantik. Begitu juga dengan misi pasangan terpilih tersebut.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Inspektorat Daerah Kabupaten . Hal ini ditunjukkan melalui :

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Salah satu upaya antisipasi yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun isu strategis yang sangat mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah meningkatkan system pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Arah kebijakan yang harus diambil dalam rangka mendukung strategi ini adalah:

- Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal.
- Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh OPD.
- Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan dalam upaya pencegahan korupsi di internal pemerintahan daerah.

3. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025, Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Inspektorat Daerah adalah yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah dalam tata kelola dan pelayanan administrasi pengawasan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah sampai dengan tahun berjalan, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Inspektorat Daerah, dalam Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 direalisasikan melalui program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	
							Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					2	3		4	5	6	7	8
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.510.341.505	7.572.774.868
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun			
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.000.000		9.150.000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-		-
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-		-
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	1 Dokumen	-		-
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-		-
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-		-
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun			

6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotapinang	Tersusunnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	30 Orang/Bulan	5.167.535.824	5.267.535.824
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	50.312.421	51.964.221
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	67.200.000	70.020.000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	-
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kotapinang	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	58.305.394	62.553.604
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kotapinang	Tersedianya Pegawai Auditor Ahli dan Meningkatkan Kualitas APIP	Bertambahnya Pegawai Auditor Ahli dan Pegawai Auditor yang berkualitas	20 Orang	697.026.000	720.336.000
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	79.587.733	113.302.633
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Bimbingan Teknis ASN	Meningkatkan Wawasan Pegawai Inspektorat	2 Orang	80.356.000	84.356.000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotapinang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Terpeliharanya Penerangan Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	7.448.962	8.340.922
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotapinang	Melengkapi Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	1 Paket	6.750.637	6.850.822
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kotapinang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	15.100.000	18.120.000

6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Menambah Informasi dan Pengetahuan tentang Regulasi Pegawai Inspektorat	12 Dokumen	29.564.384	31.334.784
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotapinang	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Luar dan Dalam Provinsi	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Luar dan Dalam Provinsi	56 Laporan	248.375.921	279.830.921
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kotapinang	Tersedianya Penambahan Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai Inspektorat	1 Tahun		
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotapinang	Penambahan Mobil Lapangan Untuk Peningkatan Kinerja ASN	Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Lapangan	3 Unit	339.332.880	-
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kotapinang	Penambahan Mebel Kantor Untuk Peningkatan Kinerja ASN	Meningkatnya Ketersediaan Mebel Kantor	21 Unit	71.545.675	81.899.881
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotapinang	Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya Untuk Peningkatan Kinerja ASN	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor	18 Unit	144.875.683	154.875.683
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotapinang	Terseleenggaranya Pengawasan dan Pembangunan Ruang Kerja Inspektorat	Tersedianya Pengawasan dan Pembangunan Ruang Kerja Inspektorat	1 Unit	1.852.221.000	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotapinang	Tersusunnya Ekspedisi Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	44 Laporan	3.408.424	3.949.006
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotapinang	Tersedianya Komunikasi dan Listrik Kantor	Mengaktifkan Fungsi Gedung Kantor	12 Laporan	94.590.348	96.990.348
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kotapinang	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terseleenggaranya Fungsi Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	222.162.804	222.162.804
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Tahun		

6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kotapinang	Perpanjangan Pajak, BBM dan Perawatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Perpanjangan Pajak, BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	39.922.750	39.922.750
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotapinang	Perpanjangan Pajak, BBM dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perpanjangan Pajak, BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	136.958.665	140.658.665
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotapinang	Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	58 Unit	37.460.000	40.220.000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotapinang	Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	51.300.000	68.400.000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					894.152.468	917.572.468
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Internal	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Tahun		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotapinang	Terawasinya Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	30.075.385	32.325.385
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kotapinang	Terawasinya Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	144.361.567	145.111.567
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kotapinang	Tereviunya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	79.500.000	81.750.000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kotapinang	Tereviunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan	15.750.000	17.250.000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan Desa	120 Laporan	178.632.702	186.132.702
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kotapinang	Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya Kerjasama Pengawasan Internal	12 Kesepakatan	11.550.000	12.000.000

6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kotapinang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	150.112.907	151.612.907
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Tahun		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kotapinang	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Tersedianya Tenaga Ahli Pemeriksaan	20 Laporan	144.012.609	147.622.609
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kotapinang	Terlaksananya Penanganan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Penanganan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	140.157.298	143.767.298
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					404.307.302	418.108.302
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Tahun		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Meningkatnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rekomendasi	41.323.400	44.933.400
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10 Rekomendasi	43.927.200	44.827.200
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	Tersedianya Pendampingan dan Asistensi	1 Tahun		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	15.750.000	16.500.000

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tersedianya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	48.934.680	49.684.680
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotapinang	Terwujudnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	205.418.022	208.118.022
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tersedianya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	48.954.000	54.045.000
Jumlah										10.808.801.275	8.908.455.638

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Tahun 2025 tetap mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan. Terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan artinya adanya kesuaian antara perencanaan pembangunan pada periode Kepala Daerah saat ini dengan Kepala Daerah berikutnya sehingga target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun ini disusun sebagai pedoman tahunan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan *Good Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN

H. SOFYAN HASIBUAN, SE, MAP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690408 199803 1 009

LAMPIRAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Sasaran		
														Nasional					Daerah
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	306.742.560	49.760.524	50.306.970	60 Dokumen	50.312.421	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	51.964.221	Inspektorat
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	297.848.510	36.960.000	25.080.000	100 Dokumen	67.200.000	Kotapinang	APBD		v	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	70.020.000	Inspektorat
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.179.790	-	-	1 Laporan	-	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Inspektorat
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.326.555	-	-	12 Laporan	-	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	Inspektorat
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	195.556.200	52.724.000	-	1 Paket	58.305.394	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	62.553.604	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.019.280.000	150.791.734	446.725.000	20 Orang	697.026.000	Kotapinang	APBD		v	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	720.336.000	Inspektorat
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	370.616.545	22.863.000	78.869.629	21 Orang	79.587.733	Kotapinang	APBD		v	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	113.302.633	Inspektorat
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	398.980.000	330.000.000	80.000.000	2 Orang	80.356.000	Kotapinang	APBD		v	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	84.356.000	Inspektorat
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	41.026.465	7.665.485	7.446.354	1 Paket	7.448.962	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	8.340.922	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23.372.535	4.616.150	6.749.301	1 Paket	6.750.637	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	6.850.822	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	135.480.049	7.508.700	12.079.904	1 Paket	15.100.000	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	18.120.000	Inspektorat

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Sasaran		
														Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	147.380.160	-	-	12 Dokumen	29.564.384	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	31.334.784	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.571.715.000	236.233.700	129.662.954	56 Laporan	248.375.921	Kotapinang	APBD		v	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	279.830.921	Inspektorat
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Disediakan	201.918.000	-	-	3 Unit	339.332.880	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Kendaraan Dinas Lapangan	3 Unit	-	Inspektorat
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	201.918.000	32.100.000	8.138.881	5 Unit	71.545.675	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Mebel	5 Unit	81.899.881	Inspektorat
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	509.797.315	42.000.000	74.217.486	9 Unit	144.875.683	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	154.875.683	Inspektorat
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.873.820.000	-	-	1 Unit	1.852.221.000	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-	Inspektorat
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.377.050	780.000	2.226.580	44 Laporan	3.408.424	Kotapinang	APBD		v	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44 Laporan	3.949.006	Inspektorat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	370.245.000	52.907.503	94.590.348	12 Laporan	94.590.348	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	96.990.348	Inspektorat
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.602.885.200	222.144.000	222.150.260	12 Laporan	222.162.804	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	222.162.804	Inspektorat
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	521.450.000	39.738.125	39.922.750	1 Unit	39.922.750	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	39.922.750	Inspektorat
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	547.550.000	131.304.216	106.351.750	12 Unit	136.958.665	Kotapinang	APBD		v	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	140.658.665	Inspektorat

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Sasaran		
														Nasional					Daerah
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	279.949.875	22.844.500	15.861.000	10 Rekomendasi	41.323.400	Kotapinang	APBD	√		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rekomendasi	44.933.400	Inspektorat
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	276.314.665	26.606.000	6.900.000	10 Rekomendasi	43.927.200	Kotapinang	APBD	√		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10 Rekomendasi	44.827.200	Inspektorat
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistansi														
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	55.087.945	373.140.800	15.750.000	10 Perangkat Daerah	15.750.000	Kotapinang	APBD		√	Terlaksananya Pendampingan, Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	16.500.000	Inspektorat
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	411.863.440	-	-	20 Perangkat Daerah	48.934.680	Kotapinang	APBD		√	Terlaksananya Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	49.684.680	Inspektorat
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.143.559.410	130.303.700	162.046.597	12 Kegiatan	205.418.022	Kotapinang	APBD	√		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	208.118.022	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	348.960.000	2.798.000	-	10 Perangkat Daerah	48.954.000	Kotapinang	APBD	√		Terlaksananya Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	54.045.000	Inspektorat
Jumlah							51.993.658.516	6.686.447.516	6.848.151.939		10.808.801.275							8.908.455.638	

Kotapinang, Januari 2024
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN

NB : Kode Rekening Sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

H. SOFYAN HASIBUAN, SE, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690408 199803 1 009